

Akuntabilitas Berbasis Amanah dalam System Pelaporan Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi Islam

Andi Muh Nur Hidayat^{1*}, Masyhuri²

¹⁻² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

email: expressitimika@gmail.com^{1*}

Article Info :

Received:

26-11-2025

Revised:

29-12-2025

Accepted:

06-01-2026

Abstract

This study examines accountability based on the concept of amanah within the Islamic financial reporting system from the perspective of Islamic accounting. Islamic financial reporting is not merely a technical process of presenting financial information, but represents a form of moral and spiritual responsibility rooted in Islamic values. The concept of amanah emphasizes honesty, justice, and transparency as core principles that guide the preparation and disclosure of financial reports. Using a qualitative and conceptual approach, this research analyzes classical Islamic thought, contemporary Islamic accounting literature, and established standards issued by regulatory and international institutions. The findings indicate that accountability in Islamic financial reporting extends beyond compliance with accounting standards and encompasses responsibility to Allah, society, and all stakeholders. The integration of maqasid al-shariah into financial reporting practices enhances the ethical quality and credibility of Islamic financial institutions. Strengthening accountability based on amanah requires consistent implementation of Islamic values, effective governance mechanisms, and continuous ethical awareness among accounting practitioners to ensure sustainable and trustworthy Islamic financial reporting.

Keywords: Accountability, Amanah, Islamic Accounting, Islamic Financial Reporting, Islamic Accounting System.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji akuntabilitas yang berlandaskan konsep *amanah* dalam sistem pelaporan keuangan syariah dari perspektif akuntansi Islam. Pelaporan keuangan syariah tidak hanya dipahami sebagai proses teknis penyajian informasi keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual yang berakar pada nilai-nilai Islam. Konsep *amanah* menekankan kejujuran, keadilan, dan transparansi sebagai prinsip utama yang membimbing penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan konseptual, penelitian ini menganalisis pemikiran Islam klasik, literatur akuntansi syariah kontemporer, serta standar yang ditetapkan oleh lembaga regulasi dan institusi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah melampaui kepatuhan terhadap standar akuntansi semata dan mencakup pertanggungjawaban kepada Allah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Integrasikan *maqasid al-shariah* dalam praktik pelaporan keuangan terbukti meningkatkan kualitas etis dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Penguatan akuntabilitas berbasis *amanah* memerlukan penerapan nilai-nilai Islam secara konsisten, mekanisme tata kelola yang efektif, serta kesadaran etis yang berkelanjutan di kalangan praktisi akuntansi guna mewujudkan pelaporan keuangan syariah yang berkelanjutan dan dapat dipercaya.

Kata kunci: Akuntabilitas, Amanah, Akuntansi Syariah, Pelaporan Keuangan Syariah, Akuntansi Islam.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sistem pelaporan keuangan dalam perspektif akuntansi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penyedia informasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Allah SWT dan masyarakat. Konsep akuntabilitas dalam Islam berakar pada prinsip amanah yang menutut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas muamalah. Al-Qur'an menegaskan kewajiban manusia untuk menunaikan amanah dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan, termasuk dalam pengelolaan dan pelaporan harta (Al-Qur'an al-Karim). Prinsip ini menjadikan pelaporan keuangan syariah memiliki dimensi etis dan transendental yang membedakannya dari sistem akuntansi konvensional.

Akuntabilitas berbasis amanah menempatkan akuntan dan pengelola keuangan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat dan Allah SWT. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran klasik Islam yang menekankan pentingnya integritas moral dalam pengelolaan harta dan aktivitas ekonomi (Al-Ghazali, t.t.). Amanah dipahami sebagai komitmen spiritual yang menuntut kesesuaian antara niat, proses, dan hasil dalam praktik akuntansi. Nilai ini memperluas makna akuntabilitas dari sekadar kepatuhan formal menjadi tanggung jawab etik yang bersifat holistik.

Perkembangan lembaga keuangan syariah menuntut sistem pelaporan keuangan yang mampu merepresentasikan nilai-nilai Islam secara substansial. Standar akuntansi dan syariah yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions memberikan kerangka normatif bagi praktik pelaporan keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah (AAOIFI, 2021a; AAOIFI, 2021b). Standar tersebut tidak hanya mengatur aspek teknis pelaporan, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral dan sosial lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam sistem syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pendekatan konvensional.

Konsep akuntabilitas Islam juga berkaitan erat dengan tujuan syariah atau maqasid al-shariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama aktivitas ekonomi. Pemikiran Chapra menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam harus selaras dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Chapra, 1992; Chapra, 2008). Dalam konteks pelaporan keuangan, maqasid al-shariah mendorong penyajian informasi yang tidak menyesatkan dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas berbasis amanah menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam praktik akuntansi.

Pelaporan keuangan syariah juga berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang mencerminkan kualitas pengelolaan lembaga keuangan Islam. Tata kelola dalam keuangan Islam menekankan hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan syariah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Chapra, 2009). Akuntabilitas yang berlandaskan amanah memperkuat mekanisme pengendalian internal dan kepercayaan publik terhadap institusi syariah. Dengan demikian, pelaporan keuangan tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja, tetapi juga cerminan kepatuhan etis dan spiritual.

Kajian akademik dalam akuntansi Islam menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki makna yang lebih luas dibandingkan paradigma akuntansi Barat. Hameed menegaskan bahwa akuntabilitas Islam mencakup pertanggungjawaban kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungan sebagai satu kesatuan nilai (Hameed, 2015; Hameed, 2019). Haniffa juga menekankan pentingnya akuntabilitas sosial dalam akuntansi Islam yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian integral dari pelaporan keuangan (Haniffa, 2002). Pandangan ini memperlihatkan bahwa akuntansi Islam berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai moral.

Dalam perspektif teori akuntansi, pelaporan keuangan dipahami sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan kepentingan tertentu. Teori akuntansi keuangan modern mengakui bahwa informasi akuntansi tidak bersifat netral, melainkan merefleksikan tujuan dan nilai yang dianut oleh sistem yang melingkupinya (Deegan, 2014). Akuntansi Islam hadir sebagai alternatif paradigma yang memasukkan nilai amanah dan tanggung jawab spiritual ke dalam proses pelaporan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa sistem pelaporan keuangan syariah memerlukan kerangka akuntabilitas yang berbeda secara konseptual.

Penelitian mengenai akuntabilitas berbasis amanah dalam sistem pelaporan keuangan syariah memerlukan pendekatan ilmiah yang mampu menangkap dimensi normatif dan empiris secara seimbang. Pendekatan penelitian dalam ilmu sosial memungkinkan penggalian makna, nilai, dan praktik akuntabilitas yang berkembang dalam konteks akuntansi Islam (Creswell, 2014). Oleh sebab itu, kajian ini menjadi penting untuk memperkaya literatur akuntansi Islam serta memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan sistem pelaporan keuangan syariah. Fokus pada perspektif akuntansi Islam diharapkan mampu mempertegas posisi amanah sebagai fondasi utama akuntabilitas keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian konseptual dan normatif untuk mengkaji akuntabilitas berbasis amanah dalam sistem pelaporan keuangan syariah dari perspektif akuntansi Islam. Data penelitian bersumber dari studi

kepustakaan yang mencakup Al-Qur'an, karya klasik dan kontemporer pemikiran Islam, standar akuntansi dan syariah lembaga internasional, serta literatur ilmiah di bidang akuntansi dan ekonomi Islam. Analisis data dilakukan melalui penelaahan kritis dan interpretatif terhadap konsep amanah, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan syariah guna mengidentifikasi keterkaitan nilai normatif dan praktik akuntansi. Pendekatan ini digunakan untuk membangun pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai peran amanah sebagai landasan utama akuntabilitas dalam sistem pelaporan keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Amanah sebagai Fondasi Akuntabilitas dalam Akuntansi Islam

Konsep amanah dalam Islam merupakan prinsip dasar yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Al-Qur'an menegaskan bahwa amanah harus ditunaikan secara adil dan akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan pelaporan keuangan (Al-Qur'an al-Karim). Pandangan ini menempatkan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab spiritual yang melekat pada setiap individu dan institusi. Akuntansi Islam memaknai pelaporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban amanah kepada Allah SWT dan masyarakat secara bersamaan (Triyuwono, 2015a).

Pemikiran klasik Islam menempatkan amanah sebagai inti dari moralitas ekonomi dan perilaku muamalah. Al-Ghazali menekankan bahwa pengelolaan harta harus dilandasi niat yang lurus, kejujuran, dan kesadaran akan pertanggungjawaban akhirat (Al-Ghazali, t.t.). Nilai ini memperluas makna akuntabilitas dari sekadar kepatuhan terhadap aturan menjadi keselarasan antara nilai batin dan praktik lahiriah. Dalam konteks akuntansi, amanah menuntut penyajian informasi keuangan yang benar, tidak menyesatkan, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umum.

Akuntabilitas berbasis amanah juga berkaitan erat dengan tujuan pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan keseimbangan sosial. Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui tata kelola yang etis dan bertanggung jawab (Chapra, 1992; Chapra, 2008). Pelaporan keuangan dalam kerangka ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai syariah. Amanah menjadi pengikat antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab moral pelaku usaha.

Dalam praktik kelembagaan, prinsip amanah diterjemahkan ke dalam standar dan regulasi yang mengatur pelaporan keuangan syariah. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions menetapkan standar akuntansi dan syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah sebagai wujud akuntabilitas amanah (AAOIFI, 2021a; AAOIFI, 2021b). Standar tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas syariah memiliki dimensi normatif dan operasional yang saling melengkapi. Hal ini memperlihatkan bahwa amanah bukan konsep abstrak, melainkan prinsip yang dapat diimplementasikan secara sistematis.

Akuntabilitas amanah juga tercermin dalam praktik tata kelola lembaga keuangan syariah. Chapra menempatkan akuntabilitas sebagai elemen kunci tata kelola yang menghubungkan pengelola, pemilik dana, dan masyarakat luas (Chapra, 2009). Tata kelola berbasis amanah mendorong keterbukaan informasi dan pengawasan yang efektif. Pelaporan keuangan menjadi sarana utama untuk menilai sejauh mana amanah tersebut dijaga dalam praktik.

Tabel 1. Indikator Akuntabilitas Berbasis Amanah dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Dimensi Amanah	Indikator Pelaporan	Sumber Data
Tanggung jawab kepada Allah	Kepatuhan syariah dan kejujuran pelaporan	AAOIFI (2021a; 2021b)
Tanggung jawab kepada manusia	Transparansi dan keadilan informasi	OJK (2020; 2021)
Tanggung jawab sosial	Pengungkapan dampak sosial	Haniffa (2002); Haniffa & Hudaib (2007)
Integritas pengelola	Konsistensi nilai dan praktik	Data primer peneliti, 2025

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa akuntabilitas berbasis amanah memiliki dimensi vertikal dan horizontal yang saling berkaitan. Dimensi tersebut menegaskan bahwa pelaporan keuangan syariah tidak hanya ditujukan untuk pemilik modal, tetapi juga untuk kepentingan publik dan nilai ketuhanan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hameed yang menempatkan akuntabilitas Islam sebagai pertanggungjawaban kepada Allah, manusia, dan lingkungan (Hameed, 2015; Hameed, 2019). Struktur ini memperlihatkan karakter khas akuntansi Islam dibandingkan sistem konvensional.

Akuntabilitas amanah juga berhubungan dengan praktik pengungkapan informasi dalam laporan keuangan syariah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dituntut untuk mengungkapkan informasi non-keuangan yang mencerminkan kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial (Haniffa & Hudaib, 2007; Sarea & Hanefah, 2013). Pengungkapan ini menjadi indikator nyata penjagaan amanah dalam praktik pelaporan. Hal tersebut memperkuat peran akuntansi syariah sebagai instrumen moral dan sosial.

Dari sudut pandang teori akuntansi, akuntabilitas amanah dapat dipahami sebagai konstruksi nilai yang membentuk tujuan pelaporan keuangan. Deegan menyatakan bahwa pelaporan keuangan merefleksikan nilai dan kepentingan yang dianut oleh sistem ekonomi tertentu (Deegan, 2014). Akuntansi Islam memasukkan amanah sebagai nilai inti yang membedakan orientasi pelaporannya. Hal ini memperkuat posisi akuntansi syariah sebagai paradigma alternatif yang berlandaskan etika religius.

Pengkajian konsep amanah dalam akuntansi Islam membutuhkan pendekatan metodologis yang mampu menangkap makna normatif dan praktik empiris secara seimbang. Pendekatan kualitatif melalui analisis teks dan dokumen memungkinkan penelusuran nilai amanah dalam standar, regulasi, dan praktik pelaporan (Creswell, 2014; Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola makna dan nilai dalam sumber-sumber normatif dan empiris (Krippendorff, 2018). Pendekatan ini memperkuat validitas konseptual kajian akuntabilitas amanah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa amanah merupakan fondasi utama akuntabilitas dalam sistem pelaporan keuangan syariah. Amanah mengintegrasikan tanggung jawab spiritual, sosial, dan profesional ke dalam praktik akuntansi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Triyuwono dan Muhammad yang menempatkan akuntansi syariah sebagai sarana penyucian nilai dan pencapaian kemaslahatan (Triyuwono, 2015b; Muhammad, 2018). Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk membahas implementasi akuntabilitas amanah dalam praktik pelaporan keuangan syariah pada sub bahasan berikutnya.

Implementasi Akuntabilitas Berbasis Amanah dalam Sistem Pelaporan Keuangan Syariah

Implementasi akuntabilitas berbasis amanah dalam sistem pelaporan keuangan syariah tercermin dari cara lembaga keuangan memandang laporan keuangan sebagai instrumen pertanggungjawaban nilai. Pelaporan tidak diposisikan semata sebagai kewajiban regulatif, tetapi sebagai media penyampaian kebenaran informasi yang mencerminkan kepatuhan syariah dan integritas pengelolaan dana umat. Pandangan ini sejalan dengan standar AAOIFI yang menekankan kejujuran substansi transaksi serta kesesuaian dengan prinsip syariah dalam setiap pengakuan dan pengungkapan laporan keuangan (AAOIFI, 2021a). Pelaporan yang amanah menjadi representasi etika institusional dalam praktik akuntansi syariah.

Dalam praktik operasional, implementasi amanah tercermin pada proses pencatatan dan pengakuan transaksi berbasis akad syariah. Setiap akad membawa konsekuensi moral yang menuntut kejelasan hak dan kewajiban para pihak, sehingga pelaporan keuangan harus mencerminkan substansi

ekonomi dan hukum syariah secara utuh (Karim, 2016; Iqbal & Mirakhor, 2011). Ketepatan klasifikasi transaksi murabahah, mudharabah, dan musyarakah menjadi indikator penting penjagaan amanah. Kesalahan penyajian berpotensi menimbulkan pelanggaran nilai syariah dan mengurangi kepercayaan publik.

Akuntabilitas amanah juga diwujudkan melalui struktur tata kelola yang mendukung transparansi dan pengawasan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah berfungsi memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kepatuhan syariah secara berkelanjutan (Chapra, 2009; OJK, 2021). Mekanisme ini memperluas akuntabilitas dari dimensi manajerial ke dimensi religius dan sosial. Pelaporan keuangan menjadi hasil dari proses pengawasan yang berlapis dan bernilai etis.

Pelaporan keuangan syariah berbasis amanah juga menuntut pengungkapan informasi sosial dan kepatuhan syariah yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan non-keuangan berperan penting dalam menilai integritas lembaga keuangan syariah (Haniffa, 2002; Hameed, 2019). Informasi terkait distribusi zakat, dana kebaikan, dan aktivitas sosial menjadi bagian dari pertanggungjawaban amanah. Praktik ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan syariah memiliki orientasi kemaslahatan yang lebih luas:

Tabel 2. Praktik Implementasi Akuntabilitas Amanah dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Aspek Implementasi	Bentuk Praktik	Sumber
Pengakuan transaksi	Berbasis akad dan substansi syariah	Karim (2016); Iqbal & Mirakhor (2011)
Pengawasan syariah	Peran Dewan Pengawas Syariah	Chapra (2009); OJK (2021)
Pengungkapan sosial	Laporan zakat dan dana kebaikan	Haniffa (2002); Hameed (2019)
Transparansi laporan	Kepatuhan standar syariah	AAOIFI (2021a; 2021b)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa implementasi amanah memerlukan integrasi antara standar teknis, pengawasan kelembagaan, dan kesadaran etis pengelola. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas syariah tidak dapat dilepaskan dari sistem tata kelola yang kuat. Temuan ini sejalan dengan laporan stabilitas industri keuangan syariah yang menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan syariah untuk menjaga kepercayaan publik (IFSB, 2022). Amanah menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Implementasi akuntabilitas amanah juga dipengaruhi oleh regulasi nasional yang mengatur pelaporan keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan menempatkan pelaporan keuangan sebagai instrumen pengawasan dan perlindungan kepentingan masyarakat (OJK, 2020; OJK, 2021). Regulasi ini memperkuat dimensi formal akuntabilitas amanah dalam praktik. Sinergi antara standar internasional dan regulasi nasional memperjelas arah implementasi akuntansi syariah.

Dari sudut pandang teori akuntansi, implementasi amanah mencerminkan pergeseran tujuan pelaporan dari orientasi pemilik modal menuju orientasi pemangku kepentingan yang lebih luas. Deegan menjelaskan bahwa sistem pelaporan dipengaruhi oleh nilai sosial dan institusional yang berlaku (Deegan, 2014). Akuntansi syariah mengadopsi amanah sebagai nilai utama yang memandu praktik pelaporan. Hal ini membedakan karakter pelaporan syariah dari sistem konvensional.

Implementasi amanah juga memerlukan kompetensi sumber daya manusia yang memahami nilai dan teknik akuntansi syariah. Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi antara nilai amanah dan praktik pelaporan (Muhammad, 2018; Karim, 2017). Pemahaman yang terbatas berpotensi menimbulkan penyimpangan praktik meskipun regulasi telah tersedia. Faktor manusia menjadi penentu kualitas akuntabilitas amanah.

Pendekatan metodologis kualitatif digunakan untuk menilai implementasi akuntabilitas amanah melalui analisis dokumen laporan keuangan dan regulasi. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran makna amanah dalam praktik pelaporan secara mendalam (Creswell, 2014; Nazir, 2014). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola pengungkapan dan kepatuhan syariah (Krippendorff, 2018). Metode ini memberikan dasar empiris bagi pemahaman implementasi amanah.

Secara keseluruhan, implementasi akuntabilitas berbasis amanah dalam sistem pelaporan keuangan syariah merupakan proses yang melibatkan nilai, regulasi, dan praktik operasional. Pelaporan keuangan menjadi sarana utama untuk merefleksikan tanggung jawab religius dan sosial lembaga keuangan syariah. Pandangan ini sejalan dengan kritik Triyuwono terhadap reduksi nilai dalam akuntansi modern dan penegasan perlunya dimensi spiritual dalam praktik akuntansi (Triyuwono, 2015b). Implementasi amanah menjadi fondasi kepercayaan dan legitimasi lembaga keuangan syariah.

Tantangan dan Penguatan Akuntabilitas Amanah dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Akuntabilitas berbasis amanah dalam sistem pelaporan keuangan syariah menghadapi tantangan yang bersumber dari dinamika industri keuangan modern. Kompleksitas produk keuangan syariah menuntut tingkat ketelitian tinggi dalam pencatatan dan pengungkapan agar tetap mencerminkan nilai syariah secara utuh. Perkembangan inovasi keuangan sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan penyesuaian pemahaman praktisi terhadap prinsip amanah (Chapra, 2008; Iqbal & Mirakhor, 2011). Kondisi ini menimbulkan risiko penyederhanaan nilai amanah dalam praktik pelaporan.

Tantangan lain muncul dari kecenderungan lembaga keuangan untuk menyesuaikan pelaporan dengan tekanan kinerja dan kepatuhan formal. Orientasi pada angka laba dan efisiensi operasional berpotensi menggeser pelaporan dari makna pertanggungjawaban moral menuju kepatuhan administratif semata (Deegan, 2014). Dalam perspektif akuntansi Islam, kondisi ini dapat melemahkan ruh amanah yang seharusnya menjadi dasar penyusunan laporan keuangan (Hameed, 2015). Pelaporan kehilangan peran etiknya ketika nilai syariah direduksi menjadi prosedur teknis.

Kesenjangan pemahaman sumber daya manusia juga menjadi tantangan signifikan dalam menjaga akuntabilitas amanah. Praktisi yang menguasai teknik akuntansi modern belum tentu memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi akuntansi Islam dan maqasid syariah (Karim, 2017; Muhammad, 2018). Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan praktik pelaporan yang sah secara teknis namun lemah secara nilai. Akuntabilitas amanah menuntut integrasi pengetahuan teknis dan kesadaran etis.

Tantangan struktural juga terlihat pada variasi tingkat kepatuhan lembaga keuangan terhadap standar internasional dan regulasi nasional. Perbedaan interpretasi standar AAOIFI dan regulasi lokal memengaruhi konsistensi pelaporan keuangan syariah (AAOIFI, 2021a; OJK, 2021). Ketidaksamaan praktik ini berdampak pada kualitas akuntabilitas antar lembaga. Kepercayaan publik berpotensi terpengaruh oleh ketidakkonsistenan tersebut:

Tabel 3. Tantangan dan Strategi Penguatan Akuntabilitas Amanah

Aspek	Tantangan Utama	Strategi Penguatan	Sumber
Produk keuangan	Kompleksitas akad	Standarisasi pengungkapan	AAOIFI (2021a)
SDM	Kesenjangan pemahaman nilai	Pendidikan etika syariah	Karim (2017); Muhammad (2018)
Tata kelola	Variasi kepatuhan	Penguatan DPS	Chapra (2009); OJK (2021)
Pelaporan	Orientasi administratif	Integrasi nilai amanah	Hameed (2015; 2019)

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa tantangan akuntabilitas amanah bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan penguatan yang komprehensif. Strategi penguatan tidak hanya berfokus pada penyempurnaan standar, tetapi juga pada pembentukan kesadaran nilai dalam praktik akuntansi. Laporan stabilitas industri keuangan syariah menegaskan pentingnya konsistensi nilai untuk menjaga keberlanjutan sektor ini (IFSB, 2022). Amanah menjadi faktor penentu stabilitas jangka panjang.

Penguatan akuntabilitas amanah dapat dilakukan melalui integrasi maqasid syariah dalam pelaporan keuangan. Chapra menekankan bahwa pembangunan ekonomi Islam harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan sosial (Chapra, 1992; 2008). Pelaporan keuangan yang

menginternalisasi maqasid syariah akan lebih mampu mencerminkan tanggung jawab sosial dan moral lembaga. Pendekatan ini memperluas fungsi laporan keuangan sebagai alat evaluasi etis.

Peran Dewan Pengawas Syariah menjadi krusial dalam menjaga konsistensi amanah di tengah tantangan praktik. Pengawasan yang aktif dan independen mampu memastikan bahwa pelaporan keuangan tidak menyimpang dari prinsip syariah (Chapra, 2009; AAOIFI, 2021b). DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga sebagai penjaga nilai. Fungsi ini memperkuat legitimasi pelaporan keuangan syariah.

Penguatan akuntabilitas amanah juga memerlukan budaya organisasi yang mendukung nilai kejujuran dan tanggung jawab. Haniffa dan Hudaib menunjukkan bahwa praktik pengungkapan sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen terhadap nilai Islam (Haniffa & Hudaib, 2007). Budaya organisasi yang kuat mendorong pelaporan yang lebih transparan dan bernalih. Amanah menjadi bagian dari identitas institusi.

Pendekatan metodologis kualitatif berperan penting dalam mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan akuntabilitas amanah. Analisis dokumen dan interpretasi nilai memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik pelaporan (Creswell, 2014; Moleong, 2017). Metode analisis isi membantu mengungkap pola dan kecenderungan pelaporan syariah (Krippendorff, 2018). Pendekatan ini memberikan dasar reflektif bagi penguatan praktik.

Akuntabilitas amanah juga berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban manusia kepada Allah dan masyarakat. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban (Al-Qur'an al-Karim). Pandangan ini diperkuat oleh pemikiran Al-Ghazali yang menempatkan amanah sebagai inti moral dalam aktivitas muamalah (Al-Ghazali, t.t.). Pelaporan keuangan menjadi sarana aktualisasi nilai tersebut dalam praktik modern.

Secara keseluruhan, tantangan akuntabilitas amanah menuntut respons yang bersifat struktural, kultural, dan individual. Penguatan nilai amanah dalam pelaporan keuangan syariah tidak dapat dicapai melalui regulasi semata, tetapi memerlukan internalisasi nilai dalam setiap level organisasi. Perspektif kritis akuntansi syariah menegaskan bahwa pelaporan keuangan harus kembali pada tujuan etik dan spiritualnya (Triuwono, 2015a; 2015b). Amanah menjadi fondasi utama keberlanjutan dan legitimasi sistem pelaporan keuangan syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas berbasis amanah merupakan fondasi utama dalam sistem pelaporan keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan teknis, tetapi juga pada pertanggungjawaban moral dan spiritual. Konsep amanah menempatkan pelaporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban kepada Allah, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas, sehingga kualitas informasi keuangan tidak dapat dipisahkan dari nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi. Penerapan standar akuntansi dan syariah yang selaras dengan maqasid syariah memperkuat legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas amanah memerlukan integrasi nilai Islam, tata kelola yang efektif, serta komitmen etis seluruh pelaku dalam praktik pelaporan keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2021a). *Accounting standards*. Manama: AAOIFI.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2021b). *Shariah standards*. Manama: AAOIFI.
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya 'ulum al-din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2009). *Corporate governance in Islamic finance*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). London: Sage Publications.
- Deegan, C. (2014). *Financial accounting theory*. Sydney: McGraw-Hill Education.

- Hameed, S. (2019). Islamic accountability and accounting. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 150–165.
- Haniffa, R. (2002). Social accountability in Islamic accounting. *Journal of Islamic Accounting Research*, 1(1), 1–17.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Disclosure practices of Islamic financial institutions: An exploratory study. *Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective Journal*, 6(1), 1–24.
- Iqbal, Z., & Mirakhori, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Singapore: Wiley.
- Islamic Financial Services Board. (2022). *Islamic financial services industry stability report*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Islam kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2018). *Akuntansi syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap keuangan syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang keuangan syariah*. Jakarta: OJK.
- Sarea, A., & Hanefah, M. M. (2013). The need of accounting standards for Islamic financial institutions. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 3(1), 1–15.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Triyuwono, I. (2015a). *Akuntansi syariah: Perspektif, metodologi, dan teori*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Triyuwono, I. (2015b). *Akuntansi syariah: Perspektif kritis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.